

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan, *“Pendataran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP No 24 Tahun 1997) Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Tanah (PP No. 37 Tahun 1998), ”*, (Madar Maju:Bandung) 1999.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadarah, Vol. 17 No. 33, 2018.
- Anna Yulianti, 2022. *Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah Guna Memberikan Perlindungan Hukum Dan Tercapai Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah*, (Bandung:P.T. Alumni)
- Arwin Septiadi, Anshori Ilyas, dan Kahar Lahae, *Pelaksanaan Pengawasan Program Nasional Agraria Dalam Rangka Tertib Administrasi Pertanahan*, Vol. 3, Riau Law Journal, 2019,
- Asep Hidayat, Engkus, Hasna Afra. N, *“Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung”*, Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 1, Nomor 1, 2018
- Asna Diroya, Roby Syaiful Ubed, *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi BMN Berupa Tanah Dalam Rangkapengamana Barang Milik Negara Pada KPKNL Semarang Tahun 2018-2019*, Vol.1, Indonesia Rich Jurnal, 2020.
- Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hukum Negara*, cet ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013).
- Basir, Abd, Mira Nila, dan Kusuma Dewi. *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtana) Sebagai Upaya Preventif Sertipikat Ganda (Overlapping)*5 (1) 2023.
- Djoko Walijatim, *Tinjauan Aspek Penyimpangan danKejahatan di BidangPertanahan*, SeminarReformasi Pertanahan, Ujung Pandang: Media FAJAR Group, 1998.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Frinaldi, A dan Haryani, D, *“Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang”*, Jurnal perspekti: Jurnal Kajian, Vol. 3, No. 4, 2020.
- Hakim, Arif Rahman M.A.I, *Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronuk Sebagai Bukti Auttentik Penguasaan Hak Atas Tanah*, JURDICA:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani.Vol 3(1).

- Haryani, D dan Frinaldi, A, “*Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang*”, Jurnal perspekti: Jurnal Kajian, 2020, Vol. 3(4)
- I Gusti Nyoman Guntur, *Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Irawan Sorodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Aekola).
- Iskandar, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Gaung Perada, Jakarta.
- Ismail Suwardi dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019).
- Jum Angraini, Op.cit., *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Kurnia Rheza Randy Adinegoro, “*Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan: Hak Tanggungan Elektronik Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang*”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 19, 2023
- Lexy. J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitati* , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).
- M. Syukran Yamin Lubis, *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*,(Medan: UMSU Press, 2018).
- Mhd. Yamin Labis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Jakarta : Mandar Maju, 2008).
- Muhammad Faniawan Arsriansyah, “*Pemetaan (Plotting) Sertipikat Tanah BMN Secara Digital Memberikan Kepastian Hukum Tanah BMN*”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15659/Pemetaan-Plotting-Sertipikat-Tanah-BMN-Secara-Digital-Memberikan-Kepastian-Hukum-Tanah-BMN.html>, diakses pada tanggal 6 Juni 2024, 2022.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasioanal Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 Tentabg Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus pertanahan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 34 Ayat 1- 3 Tentang penanganan dan Penyelesaian kasus Pertanahan.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Angka 9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020.

- Pentashihan Lajnah Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'am dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), Hal.215.
- Pinuji, S. "Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy", *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Ramadhani, Rahmat. *Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah*. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 2.1 (2021).
- Rosmidah, S.H., M.H, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6, Nomor 2, 2013
- Rusmasi Murrad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung:1991).
- Sambas Ali Muhidin, S.Pd., M.Si. *Teori dan Praktik Sistem Kearsipan*, (Bandung:2019).
- Siti Hardianti Rukmana Manurung., "Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) di Kota Pekanbaru", *Jurnal JOM FOSIP*. Vol.4. 2017, No. 2.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sukmo Pinuji, "Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy", *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 2, 2016, No. 1,.
- Supriadi. (2007), *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria Pasal 19 Ayat 1 sampai Ayat 2.
- Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 Ayat (2) Huruf c
- Urip Santoso, S.H., M.h., *Hukum Agraria Kajiann Komprehensif*, (Jakarta: PREBADAMEDIA GROUP,2012).
- Zein, M., Syahrul, R., & Silmi, A,A. "Implementasi Geo-KKp Sebagai Penerapan E-Gevorments di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I", *Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vo.2, No. 3, 2023.